

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali potensi ekonomi yang dimiliki dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Menurut Ambya (2023:194), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut (Halim 2019:235), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh pajak daerah:

- Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)
- Pajak reklame

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi daerah meliputi:

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber PAD ini berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha lainnya. Pendapatan ini mencerminkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan aset daerah.

Contoh:

- Dividen atau laba dari BUMD (Bank BJB, PDAM, dll)
- Bagian laba dari perusahaan patungan daerah

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh secara sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh:

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro

- Pendapatan bunga
- Denda administrasi
- Pendapatan BLUD
- Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah.

2.1.1.3 Pengertian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2019:30). Efektivitas pendapatan asli daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rahman 2022).

Menurut Ambya (2023:246), efektivitas pendapatan asli daerah adalah kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah direncanakan berdasarkan potensi riil daerah, di mana semakin tinggi rasio efektivitasnya maka kemampuan daerah dinilai semakin baik.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa efektivitas pendapatan asli daerah adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, yang tercermin dari tingkat keberhasilan realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Tingkat efektivitas ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai perencanaan pendapatan secara optimal,

di mana nilai rasio yang semakin tinggi mencerminkan kinerja pengelolaan PAD yang semakin baik.

2.1.1.4 Pengukuran Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan definisinya, efektivitas pendapatan asli daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Efektivitas PAD mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Semakin tinggi efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim (2019:30), efektivitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Apabila realisasi PAD mampu mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, maka pengelolaan PAD dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila realisasi PAD lebih rendah dari target, maka efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang kurang optimal.

Secara matematis, efektivitas pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Menurut Ambya (2023:245), pengukuran kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan realisasikan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana PAD mampu menopang pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah dan pembangunan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kemampuan fiskal yang lebih mandiri. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa belanja daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Dengan demikian, rasio efektivitas PAD terhadap belanja daerah dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pengelolaan PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan pengertian tersebut rumus untuk pengukuran efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
<60	Tidak Efektif
60-79	Kurang Efektif
80-90	Cukup Efektif
90-99	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: (Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang "Indikator Kontribusi, : 19969)

Dalam penelitian ini, indikator efektivitas pendapatan asli daerah yang digunakan adalah perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD (Halim 2019:30). Dalam *agency theory*, efektivitas ini mengukur performa agen dalam mencapai target yang disepakati dengan prinsipal (Darmadi, 2021:90). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwan agen mampu mengoptimalkan sumber daya untuk memenuhi ekspektasi. Indikator ini relevan karena mencerminkan hubungan *output* (realisasi) dengan *outcome* (taget) yang penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesua standar (Halim 2019:30).

Diperkuat oleh penelitian Efektivitas PAD di Kabupaten Jayapura, yang menemukan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (La Ode Abdul Wahab, 2026). Selain itu, penelitian di Provinsi Jawa Tengah Juga menunjukkan hasil serupa, dimana rasio ini mengurangi tingkat ketergantungan melalui pengelolaan pendapatan yang efisien (Eka Pradana Mahardika, 2022).

Rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bawah kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah berada dalam kondisi baik, karena

pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD, maka semakin besar pula kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Muhammad 2021:4).

2.1.2 *Flypaper Effect*

2.1.2.1 Pengertian *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan keadaan dimana pemerintah daerah cenderung menghabiskan lebih banyak dana dari transfer *intergovernmental* (seperti hibah atau subsidi dari pemerintah pusat) dari pada dari pendapatan lokal mereka sendiri, meskipun keduanya memiliki dampak yang serupa terhadap pendapatan daerah. Konsep menjelaskan bahwa uang dari pemerintah pusat “menempel” di daerah seperti kertas perangkap lalat, sehingga tidak mudah dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain dan tetap relevan dalam studi modern tentang desentralisasi fiskal (Sholihat and Lubis 2024:1610).

Menurut Avinda Deviana Somantri (2024:653) penekanan pada perilaku asimetris pemerintah daerah menjadi inti dari *flypaper effect*, dimana perilaku pengelolaan keuangan daerah tidak simetris antara dana lokal dan dana pusat. Perilaku ini asimetris karena daerah mungkin meningkatkan pengeluaran publik (seperti infrastruktur atau layanan sosial) lebih agresif saat menerima dana pusat, tetapi kurang responsif terhadap peningkatan pendapatan lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Nyoman Ayu (2024:3) menyatakan bahwa *flypaper effect* mencerminkan kegagalan pasar dalam alokasi sumber

daya fiskal, dimana pemerintah bertindak irasional dengan memprioritaskan dana eksternal, sehingga mengurangi insentif untuk kemandirian.

Menurut Bahl and M.Bird (2018:146) *flypaper effect* tidak hanya mempengaruhi pengeluaran, tetapi juga perilaku asimetris ini dapat memperburuk ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah yang lebih bergantung pada transfer pusat mungkin mengalami penurunan kemandirian keuangan, karena mereka kurang termotivasi untuk mengoptimalkan potensi lokal seperti pajak daerah atau investasi swasta. Akibatnya, *flypaper effect* berkontribusi pada siklus ketergantungan, dimana pemerintah daerah menjadi kurang efisien dalam mengelola keuangan mereka secara mandiri, dengan penekanan kuat pada perilaku asimetris yang membedakan respons terhadap sumber dana yang berbeda.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa *flypaper effect* merupakan keadaan yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah sering kali “terjebak” oleh dana transfer dari pusat, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk mandiri secara keuangan. Hal ini menciptakan perilaku asimetris dimana daerah lebih agresif dalam pengeluaran saat mendapat subsidi pusat, tetapi lambat dalam merespons kenaikan pendapatan lokal.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Flypaper Effect*

Menurut Bahl and M.Bird (2018:160) faktor yang mempengaruhi *flypaper effect* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Struktural dan Institusional

Desain sistem transfer *intergovernmental* yang tidak kondisional membuat dana “menempel” di daerah karena kurangnya syarat penggunaan spesifik, sehingga pemerintah lokal merasa bebas mengalokasikannya untuk proyek apa pun, berbeda dari pendapatan lokal yang lebih terbatas. Hal ini menciptakan asimetris, dimana transfer pusat dihabiskan agresif tanpa efisiensi.

2. Faktor perilaku dan psikologis

Perilaku asimetris pejabat daerah sering memperlakukan transfer sebagai “uang gratis” yang harus dihabiskan sepenuhnya untuk menghindari pengembalian ke pusat, sementara pendapatan lokal dijaga konservatif. Hal ini menciptakan respons asimetris dimana pengeluaran publik meningkat drastis saat transfer masuk, tapi lambat terhadap peningkatan pendapatan lokal yang diperkuat oleh motivasi pribadi atau kelompok.

3. Faktor ekonomi dan sosial

Daerah dengan ekonomi lemah atau deficit anggaran lebih rentan *flypaper effect*, karena transfer pusat menjadi sumber utama untuk menutup kesenjangan. Hal ini mengurangi motivasi untuk mengembangkan pendapatan lokal melalui pajak atau investasi, menciptakan siklus ketergantungan yang memperburuk ketimpangan fiskal antar daerah.

4. Faktor eksternal

Kebijakan pusat dan makroekonomi, seperti respons terhadap krisis ekonomi (misalnya, peningkatan transfer selama resesi) dapat meningkatkan *flypaper effect*. Transfer tambahan ini sering dihabiskan agresif oleh daerah tanpa meningkatkan produktivitas, karena dianggap sebagai solusi sementara.

2.1.2.3 Pengukuran *Flypaper Effect*

Flypaper effect dapat diukur menggunakan rasio ketergantungan fiskal yang membandingkan transfer *intergovernmental* (seperti dana perimbangan/DP dari pusat) dengan pendapatan lokal (seperti total pendapatan asli daerah/TPAD). Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah pada dana pusat yang jika tinggi, maka mengindikasikan *flypaper effect* dan mengurangi motivasi untuk kemandirian. (Bahl and M.Bird 2018:145). Secara matematis, *flypaper effect* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Realisasi DP}}{\text{Realisasi TPAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan (%)
Sangat Rendah	0-25
Rendah	26-50
Sedang	51-75
Tinggi	75-100

Sumber: (Bangga, 2017)

Menurut Bahl and M.Bird (2018:150) untuk mengukur asimetris sederhana, *flypaper effect* dapat terjadi jika rasio ketergantungan tinggi, hal ini

menunjukkan bahwa transfer tidak mendorong peningkatan TPAD. Jika rasio 80% maka menunjukkan pengeluaran lebih agresif dari transfer, hal tersebut memperkuat siklus ketergantungan. Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh formula untuk pengukuran *flypaper effect* yaitu:

$$\text{Rasio Pengeluaran Asimetris} = \frac{\text{Pengeluaran dari DP}}{\text{Pengeluaran dari TPAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Pengeluaran Asimetris

Ketergantungan (%)	Rasio Efektivitas PAD (%)
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup Tinggi
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: (Zukhri, 2020)

Dalam penelitian ini, indikator *flypaper effect* yang digunakan adalah rasio ketergantungan (Bahl and M.Bird 2018:145). Dalam *agency theory* *flypaper effect* mencerminkan perilaku agen (pemerintah daerah) dalam merespons sumber pendanaan yang diterima dari prinsipal (pemerintah daerah). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menunjukkan bahwa agen cenderung responsif terhadap dana eksternal dibandingkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah (Avinda Deviana Somantri 2024:653).

Diperkuat oleh penelitian kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bali, yang menemukan *flypaper effect* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah (Nyoman, Dewi, Wiguna, 2024). Selain itu,

penelitian lain juga menunjukkan hasil yang serupa, dimana rasio ini mengukur kapasitas fiskal untuk menghindari ketergantungan terhadap transfer pusat (Retno, Mirzalina, Sanusi, & Nurul 2025). Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas fiskal lemah sehingga mengurangi kemandirian keuangan daerah (Putu & Nyoman, 2023).

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi.

Menurut Halim (2019:232) menjelaskan bahwa kemandirian daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di daerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

Menurut Fadhilla & Marisa Adilah Putri (2025:129) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Menurut Mulyani (2024) kemandirian keuangan merupakan potensi pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah nya secara mandiri, berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat di tentukan dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah sumber lain, seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membiayai, dan memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri seperti aktivitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan maupun keuangan secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut tanpa adanya bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat.

2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan berfungsi sebagai alat pengukur untuk menilai sejauh mana kapabilitas pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian keberhasilan yang telah diperoleh dalam satu periode, secara mandiri dan tidak tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Fadhilla, Nissa, and Marisa Adilah Putri 2025:130).

Menurut Halim (2019:99) pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan membandingkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipasif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2019)

Menurut Mahmudi (2020:23) tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi fiskal ini

dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rumus untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.6

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Kemampuan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0-10
Kurang	11-20
Cukup	21-30
Sedang	31-40
Baik	41-50
Sangat Baik	>50

Sumber: (Utari, 2023)

Dalam penelitian ini, indikator kemandirian keuangan yang digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan (KKD) (Kawatu 2019:99). *Agency Theory* menjelaskan bahwa kemandirian keuangan mengurangi ketergantungan agen kepada prinsipal (pemerintah pusat), sehingga agen memiliki diskresi lebih besar dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2020:23). Indikator ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur ataupun mengelola sumber daya atau pendapatan asli daerah dengan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah tanpa menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana untuk

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

2.1.4 Teori Keagenan

Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan terjadi saat satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Rahima Purba 2023).

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi yang dimana pihak prinsipal berharap pihak agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah pusat memiliki peran sebagai prinsipal atau entitas yang memberikan wewenang, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau pelaksana tugas dan wewenang. Dalam konsep desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur segala aktivitas pemerintahannya sendiri, tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta lepas tangan. Salah satu contoh pemerintah pusat masih memiliki campur tangan terhadap kegiatan daerah adalah dengan memberi dana perimbangan dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan daerah dan memungkinkan daerah tersebut menjadi mandiri secara finansial. Dengan tujuan tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang (Hasyim et al. 2024).

Dengan gagasan mendasar bahwa agen adalah pihak yang memperoleh kekuasaan dan pemberi hibah adalah pihak yang memberikam kekuasaan, teori keagenan berpusat pada interaksi antara dua pihak. Penelitian ini menggambarkan teori keagenan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara prinsipal dan agen sebanding dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dengan pihak yang diberikan kepercayaan (agen). Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen. Teori agensi menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendorong kemandirian daerah. Daerah otonom perlu memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, sementara kemandirian daerah tercermin dari berkurangnya ketergantungan finansial pada pemerintah pusat. Dalam teori agensi, kemandirian ini berfungsi sebagai insetif bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah, karena semakin tinggi kemandirian daerah, semakin besar fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan (Rahima Purba 2023).

2.2 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Marsudi, A. Supradi, F. Susandra (2019) dengan judul penelitian “Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, secara parsial variabel Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan variabel Efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan variabel Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli. Besarnya kontribusi pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 39,4 persen.
2. Rahmawati, Raden Budi Hendaris (2025) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

3. La Ode Abdul Wahab (2026) dengan judul penelitian “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2020- 2023, kinerja APBD Kabupaten Jayapura masih menghadapi permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dengan rasioi kisaran 9,0% hingga 14% yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas PAD juga menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan rasio berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3% dan sebagian besar dikategorikan tidak efektif, meskipun pada tahun 2022 mencapai kategori cukup efektif. Sementara itu efisiensi belanja daerah menunjukkan tren penurunan dari kategori efisien tahun 2020 menjadi tidak efisien pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio 78% hingga 100%. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya strategis dan meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan pengelolaan belanja daerah guna mendukung keberlanjutan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten jayapura.
4. Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten Brebes (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

5. Eka Pradana Mahardika (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap TKKD, sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD.
6. Riyans Ardiansyah (2023) dengan judul penelitian “Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah kota Tarakan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

7. Shinta Bella, Fitrah sari, Ulya Rahmi Aswin (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Belanja modal positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Kemudian berdasarkan uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi umum dan Belanja modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.
8. Edi Saputra, Rahman Sastrawan, Andika Patria (2025) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, diukur melalui parameter pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah. Namun, variabel lainnya dalam PAD yang sah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
9. Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati (2020) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten

Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

10. Afifah Fauziah Amalia N, Haryanto (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal, dana alokasi umum memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal, dan belanja modal tidak memiliki dampak terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal.
11. Zalza Putri Maharani, Haryanto (2025) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian

keuangan. Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemandirian keuangan antara kabupaten dan kota, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti potensi sumber daya daerah dan kebijakan fiskal yang diterapkan.

12. Dian Novianti, Jouzar Farouq Ishak (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah secara parsial memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
13. Andini Nur Oktavianti, Hani Sri Mulyani, Yogi Ginanjar, Agustine Sulviani, Dadang Suhendar (2023) dengan judul penelitian “*the effect of local own source revenue, taz effort, and capital expenditure on the level of regional financial independence (study on district/city government in west java province period 2019-2021)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa the principal income of the regions influences the level of financial independence of the regions. The tax effort did not affect the financial independence of the regions. Capital expenditure has an impact on the region's level of financial independence. Region's own revenue, tax effort, and capital expenditures have a concurrent (together) impact on a region's degree of financial independence.

14. Rahmat Saleh (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Fiskal memiliki dampak negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Fiskal secara bersamaan memiliki dampak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
15. Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska Yudowati (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana

Alokasi Khusus tidak berpengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

16. Marnas, Afrizal, Yuliusman (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Keserasian Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas rasio wilayah berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemandirian. Oleh karena itu, ketika efektivitas PAD ke daerah meningkat, efek mengurangi independensi anggaran kabupaten ini sebagai kota Jambi, jumlah PAD kabupaten kota adalah yang sangat kecil dan tidak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan biaya penganggaran, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap independensi pelayanan publik. Jadi, jika efisiensi keuangan daerah cenderung lebih baik, itu bertentangan dengan independensi anggaran. Karena rata-rata biaya pembangunan adalah anggaran belanja daerah teratas sebagai Kota Jambi, lebih dari total pendapatan (defisit). Secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi, dan harmoni secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Jambi.
17. Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, Luh Gede Kusuma Dewi (2024) dengan judul penelitian “Analisis Flypaper Effect Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena efek flypaper terjadi di pemerintah daerah Provinsi Bali. Fenomena efek flypaper telah terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah; namun,

upaya perpajakan berperan sebagai moderator homologizer dalam hubungan antara efek flypaper dan kemandirian fiskal.

18. Retno Fitrianti, Mirzalina Zaenal, Sanusi Fattah, Nurul Hidayah (2025) dengan judul penelitian “*Flypaper Effect: Analysis Of Financial Transfers From The Central Government To Provincial Regions In Indonesian*”. Hasil penelitian ini menunjukkan *the results show considerable regional disparities, with Southeast Sulawesi and North Sulawesi displaying the highest dependency on central funds, while South Sulawesi exhibits relatively greater fiscal independence. These findings highlight the need for policy reforms to strengthen local revenue generation, minimize reliance on central government transfers, and prioritize investments in infrastructure. Such strategies are crucial for ensuring fiscal sustainability, enhanced local autonomy, and long-term regional growth.*
19. Avinda Deviana Somantri (2024) dengan judul penelitian “Analisis Flypaper Effect Dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Dan Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Barat, DAK, DAU, DBH, dan PAD memengaruhi belanja daerah, sedangkan di Jawa Timur, hanya DAU dan PAD yang berpengaruh. DAU di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan di Jawa Timur, sementara PAD di Jawa Timur lebih tinggi daripada di Jawa Barat. Koefisien DAU yang lebih tinggi dari pada PAD di kedua provinsi menunjukkan adanya flypaper effect selama periode penelitian.

20. Putu Dany Indrawan Sidhi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali Dan Jawa Tahun 2019-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 2) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 3) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 5) Koefisien DAU terhadap belanja modal lebih besar dibanding dengan PAD terhadap belanja modal, yang artinya telah terjadi flypaper effect; 6) Flypaper effect tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus berupaya memaksimalkan peran PAD dalam melakukan belanja daerah agar tidak terjadi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Tabel 2.7
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Marsudi, A. Supradi, F. Susandra, (2019). Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan	Efektivitas pendapatan asli daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	secara simultan Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, secara parsial variabel Kemandirian tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan variabel	Jurnal akunid ISSN 2442-3033 Volume 5 Nomor 2, Desember 2019

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat		Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018	Efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan variabel Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli. Besarnya kontribusi pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kemandirian, Efisiensi dan Efektivitas terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 39,4 persen	
2	Rahmawati & Raden Budi Hendaris (2025). Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023	Secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	Journal of Economics and Business, Volume 09, Issue 02, September 2025, p1126- 1135
3	La Ode Abdul Wahab (2026). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Belanja Daerah	Efektivitas PAD Kemandirian Keuangan Daerah	Efisien Belanja Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode tahun 2020– 2023.	Kinerja APBD Kabupaten Jayapura masih menghadapi permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dengan rasioi kisaran 9,0% hingga 14% yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.18 , No.1, Januari 2026, pp. 145~153e- ISSN: 2476- 1483, p- ISSN : 2086-

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Jayapura			Efektivitas PAD juga menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan rasio berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3% dan sebagian besar dikategorikan tidak efektif, meskipun pada tahun 2022 mencapai kategori cukup efektif. Sementara itu efisiensi belanja daerah menunjukkan tren penurunan dari kategori efisien tahun 2020 menjadi tidak efisien pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio 78% hingga 100%. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya strategis dan meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan pengelolaan belanja daerah guna mendukung keberlanjutan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten jayapura	4515, DOI: https://doi.org/10.55049/6be0g514
4	Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana alokasi umum; Belanja modal. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022	secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Journal of Accounting and Financial Research, Vol. 1, No. 4, Desember 2023

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Eka Pradana Mahardika (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019)	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana alokasi umum; Belanja modal. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019	PAD dan DAU memiliki pengaruh terhadap TKKD, sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh terhadap TKKD	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022, P-ISSN: 2503-4413
6	Riyans Ardiansyah, (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana perimbangan Pemerintah daerah kota Tarakan selama 10 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2022	Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	JPRO Vol. 4 No. 1 Tahun 2023 E-ISSN: 2775-5967
7	Shinta Bella, Fitriah Sari, Ullya Rahmi Aswin, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian	Pendapatan Asli Daerah kemandirian keuangan daerah	Dana Alokasi Umum; Belanja modal. Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Barat 2018-2019.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Belanja modal positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Kemudian berdasarkan uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui bahwa	Jurnal Syntax Transformati on, Vol. 3 No. 5, Mei 2022, p-ISSN: 2721-3854

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Daerah			Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi umum dan Belanja modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.	
8	Edi Saputra, Rahman Sastrawan (2025) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2023	Pendapatan asli daerah, diukur melalui parameter pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memiliki dampak signifikan pada kemandirian keuangan daerah. Namun, variabel lainnya dalam PAD yang sah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Lentera Akuntansi, Volume 10 Nomor 1, 2025, P- ISSN 2745- 6978, DOI: 10.34127/jra kt.v10i1.155 9
9	Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurliana Mufida (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Perimbangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2018	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Journal of Regional Economics Indonesia, Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/Journal
10	Afifah Fauziah Nur Amalia (2019) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/	Pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal, dana alokasi umum memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal, dan belanja	Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1, ISSN (online): 2337-3806

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017		Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	modal tidak memiliki dampak terhadap tingkat kemandirian keuangan lokal	
11	Zalza Putri Maharani, Haryanto (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023)	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Transfer Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian keuangan. Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemandirian keuangan antara kabupaten dan kota, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti potensi sumber daya daerah dan kebijakan fiskal yang diterapkan.	Volume 14, Nomor 3, Tahun 2025, Halaman 1-12, ISSN (Online): 2337-3806
12	Dian Novianti, J ouzar Farouq Ishak (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2016-2020.	Secara parsial, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah secara parsial memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah tidak	Indonesian Accounting Research Journal, Vol. 2 No. 3 June 2020, pp. 244-250

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				memiliki dampak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
13	Andini Nur Oktavianti, Hani Sri Mulyani, Yogi Ginanjar, Agustine Sulviani, Dadang Suhendar (2023). <i>The effect of local own source revenue, tax effort, and capital expenditure on the level of regional financial independene (study on district/city government ini west java province period 2019-2021).</i>	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Tax Effort Att the provincial city/district government. West Java from 2019 to 2021.</i>	<i>The principal income of the regions influences the level of financial independence of the regions. The tax effort did not affect the financial independence of the regions. Capital expenditure has an impact on the region's level of financial independence. Region's own revenue, tax effort, and capital expenditures have a concurrent (together) impact on a region's degree of financial independence.</i>	<i>Finace and BusinessMa nagemen Journal, Vol. 1, No. 1, 2023</i> https://ejournal.unma.ac.id/index.php/fbmj
14	Rahmat Saleh (2020). <i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Perimbangan Kabupaten Bogor (2012-2017)	Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Fiskal memiliki dampak negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Fiskal secara bersamaan memiliki dampak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik. Vol 15 No.2 Juli 2020: 111-134. ISSN: 2685-6441 (online)

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska Yudowati (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/ Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)	Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Malinau 2005-2014	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Ke mandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum ber pengaruh positif terhadap Tingkat Ke mandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus ti dak ber pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
16	Marnas, Afrizal, and Yuliusman (2019). Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Keserasian Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Keserasian Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi pada tahun 2008 dan 2012	Efektivitas rasio wilayah berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemandirian. Oleh karena itu, ketika efektivitas PAD ke daerah meningkat, efek mengurangi indenpendensi anggaran kabupaten ini sebagai kota Jambi, jumlah PAD kabupaten kota adalah yang sangat kecil dan tidak dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan biaya penganggaran, rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indenpendensi pelayanan publik. Jadi, jika efisiensi keuangan daerah cenderung lebih baik, itu bertentangan dengan indenpendensi anggaran. Karena rata-rata biaya pembangunan adalah anggaran belanja daerah teratas sebagai Kota Jambi, lebih dari total pendapatan (defisit). Secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi, dan	

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				harmonis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten/Kota Jambi.	
17	Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, Luh Gede Kusuma Dewi, I Gd Nandra Hary Wiguna (2024). Analisis Flypaper Effect Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah: Efek Moderasi Upaya Pajak	Pendapatan Asli Daerah <i>Flypaper Effect</i> Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Upaya Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bali periode 2019–2022.	Fenomena efek flypaper terjadi di pemerintah daerah Provinsi Bali. Fenomena efek flypaper telah terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah; namun, upaya perpajakan berperan sebagai moderator homologizer dalam hubungan antara efek flypaper dan kemandirian fiskal.	Jurnal Riset Akuntansi, Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar, ISSN 2088-3382, E-ISSN 2443-0641, Vol. 14 No. 1 Maret 2024
18	Retno Fitrianti, Mirzalina Zaenal, Sanusi Fattah, Nurul Hidayah (2025). <i>Flypaper Effect: Analysis Of Financial Transfers From The Central Government To Provincial Regions In Indonesian</i>	<i>Flypaper Effect</i> Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Six Provinces in Sulawesi, Indonesia</i>	<i>The results show considerable regional disparities, with Southeast Sulawesi and North Sulawesi displaying the highest dependency on central funds, while South Sulawesi exhibits relatively greater fiscal independence. These findings highlight the need for policy reforms to strengthen local revenue generation, minimize reliance on central government transfers, and prioritize investments in infrastructure. Such strategies are crucial for ensuring fiscal sustainability, enhanced local autonomy, and long-term regional growth.</i>	Public and Municipal Finance, Volume 14, Issue1, 2025
19	Avinda Deviana Somantri (2024). Analisis Flypaper Effect Dalam Perspektif Keuangan	<i>Flypaper Effect</i>	Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum	Di Jawa Barat, DAK, DAU, DBH, dan PAD memengaruhi belanja daerah, sedangkan di Jawa Timur, hanya DAU dan PAD yang berpengaruh. DAU di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan di Jawa Timur, sementara PAD di Jawa Timur lebih tinggi daripada di Jawa	JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p-ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 5, No. 4,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat Dan Jawa Timur		Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto Belanja Daerah Kabupaten Malinau 2005-2014	Barat. Koefisien DAU yang lebih tinggi daripada PAD di kedua provinsi menunjukkan adanya flypaper effect selama periode penelitian	September 2024
20	Putu Dany Indrawan Sidhi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi (2023) Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota Se-Bali Dan Jawa Tahun 2019-2021	<i>Flypaper Effect</i> Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Daerah Kinerja Keuangan Provinsi/ kabupaten/kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021	1) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 2) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 3) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; 5) Koefisien DAU terhadap belanja modal lebih besar dibanding dengan PAD terhadap belanja modal, yang artinya telah terjadi flypaper effect; 6) Flypaper effect tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus berupaya memaksimalkan peran PAD dalam melakukan belanja daerah agar tidak terjadi ketergantungan terhadap dana perimbangan.	VJRA, Vol 12 No 2, Bulan Agustus Tahun 2023 p-ISSN : 2337-537X ; e-ISSN : 2686-1941

Siti Almina Sari (2025)

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep otonomi daerah erat kaitannya dengan desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah federal kepada masing-masing daerah. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian, dan penyusunan rencana pembangunan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing (Kartika et al. 2023:401).

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Rahima Purba 2023).

Teori mengacu pada hubungan antara dua belah pihak, yaitu prinsipal sebagai pemberi kewenangan dan agen sebagai penerima kewenangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, prinsipal diperankan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang, sedangkan agen diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dan wewenang yang diberikan (Laoli, Situmorang, and

Marnaek 2020). Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dengan pihak yang diberikan kepercayaan (agen). Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen. Dalam teori ini, baik prinsipal maupun agen akan berusaha untuk selalu memaksimalkan kepentingan masing-masing (*agent self-interest*). *Agency problem* terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dan tindakan agen tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Firmansyah & Nuryani, 2020:15).

Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam organisasi sektor publik (Fitriana & Haryanto, 2024:2). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik dan negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Teori keagenan sudah dipraktikkan pada tahun 1999 sejak diberlakukannya otonomi di pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah (Sopamena et al., 2020:44). Dalam konteks pemerintah Indonesia, teori keagenan dapat ditetapkan karena pemerintah daerah terlibat dalam beberapa hubungan keagenan dengan beberapa pihak pula (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Pemerintah berperan sebagai agen dari beberapa pihak yang berperan sebagai prinsipal, yaitu pemerintah pusat sebagai subordinatnya, pemerintah provinsi, dewan perwakilan rakyat, dan masyarakat (Fitriana & Haryanto, 2024:2).

Kedudukan pemerintah daerah sebagai agen dalam hubungannya dengan pemerintah pusat atau masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki masalah keagenan, karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan public (Firmansyah & Nuryani, 2020:16). Teori agensi memiliki hubungan dengan kemandirian keuangan daerah yaitu sebagai penyediaan insentif bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah, karena semakin tinggi kemandirian daerah, semakin besar fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan (Rahima Purba 2023).

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Novianti and Ishak 2022:244). Menurut Ambya (2023:193) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD secara efektif, karena PAD menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya efektivitas pemungutan PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.

Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, yang

sekaligus memperbesar diskresi daerah dalam menentukan prioritas pembangunannya. Kemandirian keuangan dihitung dengan cara membagi jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman daerah (Kawatu,2019:99). Oleh karena itu, penerimaan PAD perlu terus didorong untuk berkembang secara berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemungkinan mengalami kelemahan fiskal akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

Menurut Muhammad (2021:4) dalam upaya meningkatkan PAD, salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah adalah tingkat efektivitas pendapatan asli daerah. Efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas PAD, maka semakin besar pula kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Menurut Halim (2019:252) efektivitas penerimaan daerah dapat dianalisis melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dan target

pendapatan yang dimiliki daerah. Daerah yang mampu mencapai atau melampaui target pendapatan menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan tingkat efektivitas yang tinggi, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Efektivitas PAD merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan fiskal. Daerah dengan tingkat efektivitas PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri karena mampu membiayai belanja daerah dari sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menciptakan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan (Rahman 2022).

Berdasarkan teori agensi yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), terdapat keterkaitan erat dengan efektivitas pendapatan asli daerah. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakatnya secara mandiri sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana berupa Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk masyarakat dan masyarakat memberikan dana dengan membayar pajak yang termasuk pada Pendapatan Asli Daerah (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah berada dalam kondisi baik, karena pemerintah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kinerja keuangan yang optimal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien, sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (La Ode Abdul Wahab, 2026).

Efektivitas pendapatan asli daerah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka indikasi pemerintah daerah mengalami kemandirian keuangan daerah akan semakin tinggi, sebaliknya rasio efektivitas yang rendah maka indikasi pemerintah mengalami kemandirian keuangan daerah akan semakin rendah (Halim, 2019:30).

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Rahmawati & Hendaris (2025) dan Marsudi, Supradi, and Susandra

(2019) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD suatu daerah maka semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerahnya.

Kemudian pada penelitian pada penelitian Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati (2020) dan La Ode Abdul Wahab (2026) menemukan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, efektivitas pendapatan asli daerah diduga berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah *flypaper effect*. *Flypaper effect* merupakan suatu keadaan dimana pemerintah daerah cenderung menghabiskan lebih banyak dana dari transfer *intergovernmental* (seperti hibah atau subsidi dari pemerintah pusat) dari pada dari pendapatan lokal mereka sendiri, meskipun keduanya memiliki dampak yang serupa terhadap pendapatan daerah. Konsep menjelaskan bahwa uang dari pemerintah pusat “menempel” di daerah seperti kertas perangkap lalat, sehingga tidak mudah dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain dan tetap relevan dalam studi modern tentang desentralisasi fiskal (Retno, Mirzalina, Sanusi & Nurul Hidayah, 2025).

Menurut Avinda Deviana Somantri (2024:653) penekanan pada perilaku asimetris pemerintah daerah menjadi inti dari *flypaper effect*, dimana

perilaku pengelolaan keuangan daerah tidak simetris antara dana lokal dan dana pusat. Perilaku ini asimetris karena daerah mungkin meningkatkan pengeluaran publik (seperti infrastruktur atau layanan sosial) lebih agresif saat menerima dana pusat, tetapi kurang responsif terhadap peningkatan pendapatan lokal. Hal ini sejalan dengan pendapatan Nyoman Ayu (2024:3) menyatakan bahwa *flypaper effect* mencerminkan kegagalan pasar dalam alokasi sumber daya fiskal, dimana pemerintah bertindak irasional dengan memprioritaskan dana eksternal, sehingga mengurangi insentif untuk kemandirian.

Menurut Bahl and M.Bird (2018:146) *flypaper effect* tidak hanya mempengaruhi pengeluaran, tetapi juga perilaku asimetris ini dapat memperburuk ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah yang lebih bergantung pada transfer pusat mungkin mengalami penurunan kemandirian keuangan, karena mereka kurang termotivasi untuk mengoptimalkan potensi lokal seperti pajak daerah atau investasi swasta. Akibatnya, *flypaper effect* berkontribusi pada siklus ketergantungan, dimana pemerintah daerah menjadi kurang efisien dalam mengelola keuangan mereka secara mandiri, dengan penekanan kuat pada perilaku asimetris yang membedakan respons terhadap sumber dana yang berbeda.

Berdasarkan teori agensi yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), terdapat keterkaitan erat dengan *flypaper effect*. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan

masyarakatnya secara mandiri sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana berupa Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Namun, dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah berpotensi menimbulkan *flypaper effect* (Avinda Deviana Somantri, 2024:653).

Flypaper effect mencerminkan perilaku asimetris agen yang cenderung meningkatkan pengeluaran publik (seperti infrastruktur atau layanan sosial) lebih agresif saat menerima dana pusat, tetapi kurang responsif terhadap peningkatan pendapatan lokal (Nyoman Ayu, 2024:3). Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengambil keputusan belanja publik bagi masyarakat, sementara masyarakat berperan sebagai penyedia dana melalui pembayaran pajak dan retribusi yang termasuk dalam PAD (Retno, Mirzalina, Sanusi & Nurul Hidayah, 2025).

Kemandirian keuangan daerah dapat tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer. Ketika *flypaper effect* terjadi secara kuat, peningkatan dana transfer tidak diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal, sehingga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal yang efektif.

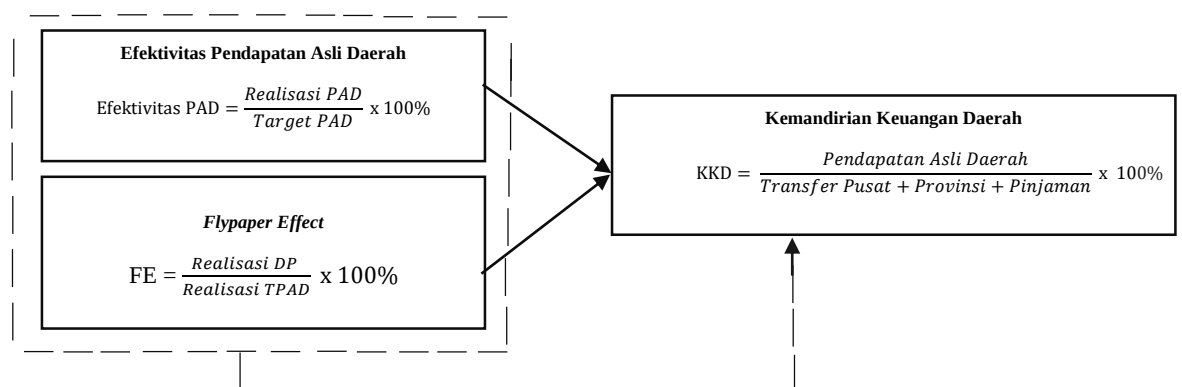
Sebaliknya, rendah nya tingkat *flypaper effect* mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara lebih mandiri dan berkelanjutan (Putu Dany Indrawan Sidhi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, 2023).

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat akan melemahkan kapasitas fiskal daerah dan menghambat pencapaian otonomi daerah yang efektif. *Flypaper effect* dapat diukur menggunakan rasio ketergantungan fiskal yang membandingkan transfer intergovernmental (seperti dana perimbangan/DP dari pusat) dengan pendapatan lokal (seperti total pendapatan asli daerah/TPAD). Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah pada dana pusat yang jika *flypaper effect* tinggi, maka indikasi pemerintah daerah mengalami kemandirian keuangan daerah akan semakin rendah, sebaliknya *flypaper effect* yang rendah maka indikasi pemerintah mengalami kemandirian keuangan daerah akan semakin rendah (Bahl and M.Bird 2018:145).

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Fitrianti et. al (2025) menunjukkan adanya hubungan antara *flypaper effect* dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Nyoman Ayu & Luh Gede (2024) fenomena efek flypaper telah terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Kemudian adapun, penelitian Avinda Deviana (2024) menyatakan bahwa Koefisien DAU yang lebih tinggi dari pada PAD menunjukkan adanya pengaruh negatif flypaper effect terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian pada penelitian Sholihat and Lubis (2024) dan Swasito (2021) menemukan bahwa *flypaper effect* berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dalam suatu daerah mengindikasikan rendahnya kemandirian keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, *flypaper effect* diduga berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian, Efektivitas PAD dan *Flypaper Effect* dipandang sebagai dua variabel penting yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi efektivitas PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, semakin kuat *flypaper effect*, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah (Khoiriyah 2019). Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- = Pengaruh Secara Parsial
- - - - -→ = Pengaruh Secara Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
3. *Flypaper Effect* secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.